BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial. Menurut Todaro (2003) dalam tujuan suatu pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang di upayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Semua negara di dunia perlu melakukan pembangunan, demikian pula dengan negara Indonesia. Dalam melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang besar untuk mencukupinya. Pemerintah dalam hal ini terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tingggi rendahnya pendapatan rill per kapita. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup seluruh aspek ekonomi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan secara massif ini akan membutuhkan dana yang sangat besar (Amalia et al., 2019).

Sebagaimana yang terdapat pada teori *big push*, di mana dalam teori ini menyatakan bahwa pemerataan pembangunan di semua bidang ekonomi dan semua wilayah akan membutuhkan dana besar sementara dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat terbatas (Muchlisin et al., 2019).

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah pusat mendorong dilakukannya Undang-Undang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan harus diberdayakan. Daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber dana dari pusat dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki. Daerah harus memaksimalkan pendapatan daerah mereka sendiri untuk mencukupi kebutuhan dana akan kebutuhan pengeluaran pembangunan daerah. Sehingga penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, harapannya adalah daerah mampu mandiri dalam melakukan pembangunan (Sukmawati & Ishak, 2019).

Indonesia di tahun 2020 memiliki pengeluaran pembangunan yang masih lebih besar daripada pendapatannya. Pengeluaran pembangunan dan pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1-1.

Tabel 1. 1 Pengeluaran Pembangunan dan Pendapatan Indonesia 2020 (Juta Rupiah)

Negara	Pendapatan Nasional	Pengeluaran Pembangunan
Indonesia	367.624.359	407.167.366

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Tabel 1-2 memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan antara pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat PAD tertinggi sebesar 82.195.994 juta rupiah masih memiliki ketimpangan antara pendapatan asli dengan pengeluaran pemerintah sebesar 5.760.154 juta rupiah. Tabel di 1-2 juga memperlihatkan bahwa

hampir di setiap provinsi memiliki pengeluaran yang jauh lebih banyak dan tidak sejalan dengan pendapatan asli daerah yang diperoleh.

Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Juta Rupiah)

No.	PROVINSI	PAD	Pengeluaran Pemerintah
1	ACEH	13.977.581	15.798.122
2	SUMATERA UTARA	13.880.971	14.180.971
3	SUMATERA BARAT	6.987.606	7.364.942
4	RIAU	8.420.419	8.486.303
5	JAMBI	4.693.997	5.244.839
6	SUMATERA SELATAN	10.344.744	10.645.596
7	BENGKULU	3.368.877	3.490.757
8	LAMPUNG	6.941.828	7.195.028
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2.301.338	2.489.646
10	KEP. RIAU	3.882.832	3.957.832
11	DKI JAKARTA	82.195.994	87.956.148
12	JAWA BARAT	41.583.153	46.095.261
13	JAWA TENGAH	28.301.075	29.106.574
14	DI YOGYAKARTA	6.130.178	6.673.341
15	JAWA TIMUR	33.028.697	35.232.562
16	BANTEN	12.609.363	13.264.391
17	BALI	6.605.532	7.360.707
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.072.281	5.136.123
19	NUSA TENGGARA TIMUR	6.210.888	6.851.778
20	KALIMANTAN BARAT	6.332.880	6.632.880
21	KALIMANTAN TENGAH	4.829.733	5.062.890
22	KALIMANTAN SELATAN	7.230.905	7.580.905
23	KALIMANTAN TIMUR	8.763.477	9.214.806
24	KALIMANTAN UTARA	2.558.696	2.857.450
25	SULAWESI UTARA	4.105.706	4.558.858
26	SULAWESI TENGAH	4.267.856	4.594.377
27	SULAWESI SELATAN	8.978.369	9.302.369
28	SULAWESI TENGGARA	4.432.855	5.783.129
29	GORONTALO	1.719.762	1.719.762
30	SULAWESI BARAT	1.951.548	2.019.077
31	MALUKU	3.373.516	3.380.216
32	MALUKU UTARA	2.795.699	3.360.171
33	PAPUA BARAT	9.120.609	9.371.589
34	PAPUA	14.602.975	15.197.966

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau kecil disekitarnya. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dan masing masing provinsi atau daerah memiliki potensi daerah dan keunggulan dalam beberapa aspek pendapatannya. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah perwujudan dari penggalian potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah (Syamsul & Irma, 2020).

Menurut Rahmadi & Parmadi (2019), ketimpangan antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran pembangunan pemerintah ini artinya masih dibutuhkan kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, di mana "Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk bisa memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki dengan tujuan supaya dari potensi ekonomi tersebut dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Karena dengan demikian daerah mampu mandiri dan bisa membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri serta tidak tergantung pada pusat.

Luas wilayah merupakan kesatuan geografis dari suatu daerah beserta seluruh unsur yang terkait terhadap batas dan sistem yang berlaku yang ditentukan berdasarkan aspek administrastif serta aspek fungsional yang dimiliki. Jika suatu daerah mempunyai wilayah yang cukup luas, maka akan menghabiskan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Sehingga jika daerah tersebut ingin maju dan sejahtera, maka pemerintah daerah harus menyediakan anggaran yang banyak untuk dapat melakukan pembangunan (Marseno & Mulyani, 2020).

Mankiw (2007) menyebutkan input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian pada suatu daerah akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Apabila sektor perekonomian yang ada pada daerah mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Indeks harga konsumen adalah indeks yang menggambarkan perubahan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum atau merupakan angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen pada suatu periode tertentu. Jika harga terus naik dan tidak terkendali, maka menyebabkan inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun, sehingga pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah secara langsung juga akan terpengaruh (Afiyah, 2011).

Menurut Rakhmadhani (2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai dampak positif bagi aktifitas perekonomian daerah. Jika aktifitas ekonomi pada sektor itu terjadi kenaikan, berpengaruh terhadap besaran pendapatan asli daera, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung, artinya setiap adanya kenaikan PDRB maka akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD didalam pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadikan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana luas wilayah, jumlah tenaga kerja, IHK, dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Luas Wilayah, Jumlah Tenaga Kerja, IHK dan PDRB Pada Pendapatan Asli Daerah 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang ingin disampaikan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh luas wilayah pada pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja pada pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh indeks harga konsumen pada pendapatan asli daerah provinsi- provinsi di Indonesia tahun 2020?
4. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto pada pendapatan asli daerah provinsi- provinsi di Indonesia tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh luas wilayah pada pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020.
2. Menganalisis pengaruh jumlah tenaga kerja pada pendapatan asli daerah provinsi- provinsi di Indonesia tahun 2020.
3. Menganalisis pengaruh indeks harga konsumen pada pendapatan asli daerah provinsi- provinsi di Indonesia tahun 2020.
4. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto pada pendapatan asli daerah provinsi- provinsi di Indonesia tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Badan Pendapatan Daerah (Bappeda)

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) terkait terutama bagi Bappeda dalam merencanakan pembangunan daerah sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu memberikan kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan melalui arah kebijakan yang digunakan. Badan pendapatan daerah dapat melakukan berbagai kebijakan guna menggali potensi setiap daerah agar penerimaan pendapatan asli daerah akan meningkat.

2. Dinas Ketenagakerjaan

   Penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan bagi dinas tenaga kerja dalam merumuskan di bidang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia agar produktifitas tenaga kerjanya meningkat.

3. Referensi penelitian yang akan datang

4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian mendatang terkait pendapatan asli daerah (PAD).

E. Metode Penelitian

E.1. Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data *cross section*. Data-data yang dimaksud antara lain luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen (IHK) dan produk domestik regional bruto (PDRB), di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020. Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik.

E.2. Alat analisis data

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh luas wilayah, jumlah tenaga kerja, indeks harga konsumen (IHK) dan produk domestik regional bruto (PDRB) mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2020 adalah model analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS). Formulasinya adalah sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2012):

$$\log PAD_i = \beta_0 + \beta_1 \log LW_i + \beta_2 \log TK_i + \beta_3 \log IHK_i + \beta_4 \log PDRB_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan asli daerah (ribu rupiah)
LW	: Luas wilayah (km^2)
TK	: Jumlah tenaga kerja (orang)
IHK	: Indeks harga konsumen (persen)
PDRB	: Produk domestik regional bruto (miliar rupiah)
log	: Operator Logaritma
i	: *Cross section*
ε	: *error term*

Tahapan estimasi model ekonometrik akan meliputi: estimasi parameter model ekonometrik: uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh variabel independen.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu/studi terkait mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Selanjutnya, pada bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis, dan berbagai uji yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil perhitungan dari analisis data dan pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada.

Bab V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berupa masukan yang dapat digunakan untuk pemerintah dan untuk peneliti selanjutnya.